

POLA KOMUNIKASI MILITER DALAM PROGRAM SWASEMBADA PANGAN DI WILAYAH KORAMIL 1607/-01 SUMBAWA

Abbyzar Aggasi^{1*},² Firda Wahyu Ningtiyas²

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Sumbawa

*Corresponding Author email: abbyzar.aggasi@uts.ac.id, ningtiyasfirda97@gmail.com

Abstrak

Diterima

Bulan Mei 2019

Diterbitkan

Bulan Juli 2019

Keyword :

Komunikasi,
Militer,
Swasembada
Pangan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola komunikasi yang terjadi pada Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI-AD dalam tugasnya membina para petani di wilayah KORAMIL Kota 1607/-01 Sumbawa. Babinsa merupakan salah satu cabang dalam TNI-AD yang bertugas dan bertanggung jawab dalam bidang kewilayahan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap tiga informan yang dipilih berdasarkan jabatan strategis dalam bidang teritorial. Peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi sebagai pendukung hasil wawancara. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Swasembada Pangan merupakan bagian dari Ketahanan Nasional yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan negara. Hal tersebut menjadi bagian dari tugas pokok TNI-AD. Dalam lingkup internal militer, komunikasi yang digunakan bersifat instruktif. Para Babinsa wajib patuh dan melaksanakan perintah yang datang dari pusat komando. Namun dalam pelaksanaan Program Swasembada Pangan, Babinsa menggunakan komunikasi yang bersifat persuasif kepada para petani. Peneliti juga menemukan adanya kecenderungan nilai kearifan lokal 'Kerik Salamet' dengan instrumen 'saling beme' oleh Babinsa kepada para petani. Hal tersebut menjadi strategi yang berjalan efektif sehingga para petani mampu bekerja dengan Babinsa yang memiliki karakter militer. Sehingga Program Swasembada Pangan di wilayah KORAMIL 1607/-01 Sumbawa membuahkan hasil yang cukup optimal bagi komoditi utama, yaitu padi, jagung dan kedelai.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu bidang terpenting dalam indikator kesejahteraan suatu negara, termasuk Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lahan pertanian yang luas. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, pembangunan infrastruktur dan perkembangan di sektor pertanian. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara pengespor beras terbesar di dunia dan mencapai swasembada beras pada tahun 1980-an. Arah dan pola pembangunan ekonomi Sektor pertanian merupakan salah satu bidang terpenting dalam indikator kesejahteraan suatu negara, termasuk Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lahan pertanian yang luas. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, pembangunan infrastruktur dan perkembangan di sektor pertanian. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar di dunia menjadi negara pengespor beras terbesar di dunia dan mencapai swasembada

beras pada tahun 1980-an. Arah dan pola pembangunan ekonomi pada masa Orde baru dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang sudah dilaksanakan sampai dengan Pelita VII (sampai tahun 1996).

Oleh karena itu, swasembada pangan merupakan hal yang bukan tidak mungkin, karena sektor pertanian menjadi 2omes tersendiri dalam Rapelita yang di buat oleh Presiden Soeharto. Di dalam Pelita I bahkan pertanian dan irigasi dimasukkan sebagai satu bab tersendiri dalam rincian rencana bidang-bidang. Di dalam rincian tersebut dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk peningkatan produksi pangan terutama beras.

Latar belakang sebagai seorang militer membuat sistem pemerintahan serta kebijakan-kebijakan yang dibuat juga bersifat instruktif dan otoriter dengan satu pusat komando. Soeharto membuat suasana pemerintah ibarat subjek penguasa, sedangkan rakyat (petani) sebagai subjek untuk ditaklukkan. Inti dari cara ini adalah instruksi presiden yang disalurkan secara 2omestic ke petani. Sebagai penyalur

informasinya, dibentuk organisasi Bimbingan Massal (Binmas) yang melibatkan semua level pemerintahan dari pusat sampai desa. Di tingkat petani, dibentuk kelompok-kelompok tani yang berfungsi untuk menjalankan instruksi di lapangan.

Hal inilah yang dilakukan oleh Soeharto, khas dengan aroma militer yang instruktif, tegas dan terpusat. Membuat langkah strategis, menginstruksikan kepada para prajuritnya, kemudian dilaksanakan oleh prajuritnya dengan pengawasan ketat. Sehingga hasilnya adalah Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984 dan dianugerahi sebuah medali bertuliskan “*from rice importer to self sufficiency*” dari *Food and Agriculture Organization* (FAO). Beberapa tahun kemudian kembali mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai kependudukan. Metode tersebut menjadi salah satu penyebab keberhasilan kepemimpinannya, membawa pembangunan ekonomi Indonesia mengalami kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga Indonesia dikenal sebagai salah satu dari Macan Asia, sependapat dengan Peter Kasenda (2013).

Akan tetapi, prestasi Indonesia dalam bidang pertanian dan pangan tidak berlangsung selamanya. Jauh setelah era Orde Baru, pada tahun 2013, hasil Sensus Pertanian (ST) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia tiap tahunnya masih mengalami peningkatan impor produk pertanian baik dari sisi nilai maupun volume. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Adi Lukmasono pada saat jumpa pers perihal Sosialisasi Hasil Sensus Pertanian tahun 2013 mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor produk pertanian, meskipun jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian tergolong tinggi mencapai 38,07 juta orang dari total angkatan kerja di Indonesia. Meskipun jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian tergolong tinggi, namun pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk turut memicu meningkatnya kebutuhan dan permintaan pasar domestik akan produk pertanian. Nilai impor produk pertanian pada satu dekade lalu (ST2003) bernilai 3,34 milyar dollar AS, kemudian pada 2013 melonjak empat kali lipat menjadi 14,90 milyar dollar AS walau sudah ada kenaikan harga.

Dengan adanya fenomena tersebut, pemerintah Indonesia mencoba mewujudkan kembali swasembada pangan yang pernah terjadi di era Orde Baru melalui kerjasama dengan lembaga militer TNI AD, yaitu penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman nomor 10/MOU/RC.120/M/12/201

6, nomor Kerma/18/XII/2016 antara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang program pembangunan Pertanian tahun 2016 dan 2017 sejak tahun 2015. Seluruh Babinsa (Bintara Pembina Desa) akan membantu petani agar program swasembada pangan ini dapat terwujud pada tahun 2017. Dukungan dari jajaran TNI ini telah diwujudkan mulai dari persiapan tanaman sampai dengan pengawalan benih dan pupuk. Pelatihan singkat telah diberikan kepada Babinsa berupa penyuluhan oleh para pakar dari Dinas Pertanian dan Balitbangtan untuk memudahkan operasional mereka di lapangan.

Untuk bisa mencapai target tersebut, TNI terlibat melakukan pemantauan seperti mengawasi langsung pendistribusian pupuk subsidi kepada para petani, mengingat pupuk dan obat-obatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka mencapai swasembada pangan tersebut. Dalam hal ini, Babinsa melakukan koordinasi dengan semua pihak secara terus-menerus. Keterlibatan militer dalam program ini adalah untuk mendorong masyarakat menanam tepat waktu, menyesuaikan dengan program pemerintah, sehingga hasil yang dicapai bisa maksimal.

Adanya program Swasembada Pangan yang diciptakan oleh pemerintah dengan mengoptimalkan kerja para petani selaku masyarakat, dengan menggandeng militer, khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI Angkatan Darat, merupakan salah satu bentuk komunikasi sipil- militer yang terjalin melalui sebuah kebijakan untuk kepentingan bersama semua pihak. Serta program, swasembada pangan ini nantinya akan berdampak bagi semua sektor kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainnya yang berarti tidak adanya egois dalam pihak manapun. Sehingga, yang menjadi titik penelitian ini adalah pola komunikasi militer terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program swasembada pangan di wilayah KORAMIL Kota 1607/-01 Sumbawa.

Kerangka Dasar Teori

Militer

Secara konkrit, militer berarti Tentara Nasional Indonesia, yaitu organisasi kekuatan bersenjata yang memiliki kewajiban menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. TNI terbagi menjadi tiga matra yaitu, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara. Pasal 1 BAB 1 dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dari pertahanan negara yang siap digunakan

untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Meskipun setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membela pertahanan negara, perkara ini tidak terlepas dari peran masyarakat militer sebagai salah satu komponen penting dalam bidang pertahanan. Masyarakat militer merupakan masyarakat yang berdiri sendiri seperti masyarakat administratif lainnya. Tetapi, dalam waktu yang sama, beban dan tanggung jawab berat yang tidak dapat diemban oleh masyarakat-masyarakat lainnya ini diletakkan di atas punggung masyarakat militer, yaitu menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat besar pada waktu perang dan damai, serta memberi sumbangsih dalam tugas-tugas penyelamatan dalam kondisi bencana alam dan darurat (Az-Zaghul, 2004: 24).

Komunikasi

Menurut pakar komunikasi Hovland yang dikutip Onong Uchjana, komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (2007: 9). Para peminat komunikasi sering kali mengutip paradigma yang dikemukakan oleh Harold D. Laswell yang terdiri dari lima unsur komunikasi yaitu komunikator, pesan atau media, komunikan, dan efek. Dari paradigm tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator melalui sebuah media kepada komunikan yang menimbulkan efek tertentu.

Wilbur Schramm (2006: 1-3) mengatakan bahwa dalam konteks komunikasi, masyarakat dapat dilihat sebagai sejumlah hubungan (*relationship*) dimana masing-masing orang mengambil bagian (*sharing*) atas informasi. Komunikasi diyakini sebagai usaha menimbulkan suatu kebersamaan (*commonnes*) dengan seseorang melalui pembagian informasi, ide dan sikap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu menimbulkan sebuah kebersamaan.

Komunikasi dapat terjadi dalam berbagai ruang lingkup menurut Onong, yaitu:

- a. Kelompok Kecil (*small group, micro group*)
- b. Kelompok Besar (*large group, macro group*)
- c. Organisasi

Ada beberapa teknik untuk yang dapat dilakukan untuk berkominikasi menurut Deddy Mulyana (2007: 55), yaitu:

- a. Komunika Informatif, yaitu memberikan keterangan kemudian komunikasi mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri.
- b. Komunikasi Persuasif, yaitu berisikan bujukan dengan membangkitkan pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang disampaikan komunikator memberikan perubahan sikap dan tindakan, tetapi perubahan tersebut atas kehendak diri sendiri.
- c. Komunikasi Instruktif/koersif, yaitu penyampaian sifat yang bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi apabila tidak dilaksanakan. Komunikasi dalam teknik ini dapat berbentuk perintah, instruksi, dan sebagainya.

Komunikasi dalam lingkup organisasi memiliki arah komunikasi (Hardjana, 2016: 145-154) sebagai berikut:

- a. Komunikasi ke Bawah (*Top-Down*)
- b. Komunikasi ke Atas (*Bottom-Up*)
- c. Komunikasi Horizontal
- d. Komunikasi Lintas Saluran

Swasembada Pangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), swasembada berarti usaha mencukupi kebutuhan sendiri (beras dan sebagainya). Jadi, swasembada pangan adalah keadaan dimana suatu negara mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dalam bidang pangan. Istilah swasembada pangan berpacu pada landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 mengamanatkan pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan, serta menjelaskan tentang konsep ketahanan pangan, komponen dan pihak yang berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Berdasarkan definisi ketahanan pangan dalam UU No. 7 Tahun 1996 yang mengadopsi FAO (*Food Association Organisation*), terdapat 5 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan dan swasembada pangan, yaitu:

1. Kecukupan ketersediaan pangan.
2. Stabilitas ketersediaan pangan.
3. Fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun.
4. Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan.
5. Kualitas/keamanan pangan.

Perspektif Militer

Keterlibatan para prajurit TNI dalam Program Swasembada Pangan yang terhitung sejak tahun 2015 sangat diharapkan dan dinantikan, mengingat TNI memiliki kekuatan, kemampuan dan kemauan dalam memberikan dukungan, termasuk dalam hal teknis (Pilar Pertanian Edisi 36/Januari 2017). Kekuatan komando yang terurai tegak lurus sampai ke bawah secara terstruktur memungkinkan TNI untuk berperan secara aktif dalam membantu pemerintah, terutama meningkatkan swasembada pangan.

Program Swasembada Pangan didahului penandatanganan kerjasama (MoU) antara Kepala Staf Angkatan Darat dan menteri Pertanian. Kemudian ditindak lanjuti oleh seluruh komando kewilayahan TNI mulai dari KODAM, KOREM, KODIM. Dari KODIM turun KORAMIL dan seluruh aparat teritorial lainnya yang terlibat langsung dalam menyukseskan program tersebut sebagai sebuah surat perintah atau surat tugas. Program Swasembada Pangan menjadi urgensi bagi lembaga militer, khususnya TNI-AD karena ketahanan pangan sangat penting dan strategis bagi keberadaan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan yang terkait dengan pangan dapat menjadi pemicu terjadinya krisis yang berujung pada kehancuran sebuah negara.

Keterlibatan TNI-AD dalam pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan dalam Tugas Pokok TNI-AD (PPA TNI-AD TA 2012 sesuai Peraturan KSAD No. Perkasad/125/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011) Pasal 1 dan 4 ayat d dan e, sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas TNI Matra Darat bidang pertahanan dalam Operasi Militer bidang Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
2. d. Membantu tugas pemerintah memberi bantuan kemanusiaan, menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, merehabilitasi infrastruktur dan mengatasi

masalah akibat pemogokan serta konflik manual.

- e. Membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan kemandirian TNI – Rakyat.

Memahami Indonesia sebagai negara agraris, dimana mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani, maka TNI sejak lama membuat program ABRI Masuk Desa (AMD) dan selanjutnya disempurnakan menjadi Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD (Pilar Pertanian Edisi Januari 2017). Sehingga hadirnya TNI-AD dalam Program Swasembada Pangan merupakan bagian dari tugas pokok dan tanggung jawab. Disamping itu, Pengerahan Babinsa dilakukan untuk mengatasi kekurangan tenaga pendamping bagi kelompok tani di Indonesia 70.000 orang dan sementara ditutupi sekitar 50.000 personil Babinsa di seluruh Indonesia. Ketahanan Pangan juga merupakan pondasi yang mencerminkan ketahanan nasional, dan ketahanan nasional adalah tanggung jawab utama dari TNI.

Program Swasembada Pangan tidak hanya terpusat pada suatu wilayah, melainkan tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Program tersebut menggunakan media lahan pertanian atau sawah yang merupakan salah satu aspek geografis suatu wilayah. Dari aspek geografis akan berdampak terhadap aspek sosial dan juga ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.

Aspek-aspek wilayah tersebut menjadi aspek-aspek yang termasuk dalam bidang teritorial TNI- AD. Kapten Infanteri Robert selaku Perwira Seksi (Pasi) Teritorial KODIM 1607/Sumbawa menjelaskan tugas dan tanggung jawab Pasi Teritorial, sebagai berikut:

1. Merencanakan/mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teritorial dengan pejabat instansi terkait.
2. Merencanakan dan melaksanakan pendataan bidang geografis, demografis, kondisi sosial yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
3. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan staf teritorial.
4. Bertanggung jawab tentang piranti lunak staf teritorial.
5. Bertanggung jawab tentang Pengendalian Kerusakan Daerah (Dalsakrah) di wilayah.

Sejalan dengan kegiatan yang dilakukan TNI-AD dalam mendukung pencapaian Swasembada Pangan Nasional dan Ketahanan Nasional di bidang pangan maka TNI mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut. TNI juga memperluas cakupan sasaran kegiatan dengan harapan dapat mempercepat pencapaian Swasembada Pangan Nasional dan akhirnya Ketahanan Nasional di bidang pangan akan segera terwujud.

Swasembada Pangan oleh KORAMIL

Dalam program ini, Komando Rayon Militer (KORAMIL) merupakan satuan TNI-AD yang memiliki keterlibatan lebih intens terhadap masyarakat. KORAMIL merupakan salah satu lembaga dalam TNI-AD yang berada di bawah naungan KODIM. KORAMIL tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada pada suatu kabupaten/kota. KORAMIL 1607/-01 Sumbawa adalah salah satu lembaga TNI-AD yang bertanggung jawab terhadap 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa, yakni Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Unter Iwes dan Kecamatan Batu Lanteh. KORAMIL memiliki tugas dan tanggung jawab setara dengan Camat dan Kepala Polisi Sektor (Kapolsek).

KORAMIL dipimpin oleh seorang Komandan Komando Rayon Militer (Danramil) yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan serta kegiatan yang dilaksanakan oleh anggotanya sesuai dengan tugasnya.
2. Membuat rencana kegiatan pembinaan sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab satuannya.
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup wilayah tugas dan tanggung jawabnya.
4. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan mental serta peningkatan kesejahteraan, moril, hukum, disiplin dan tata tertib satuan.
5. Melaksanakan Pembinaan Teritorial dan perlawanan rakyat sesuai rencana kerja Dandim.
6. Melaksanakan pendataan geografis, demografi dan kondisi sosial serta memeliharanya untuk kepentingan perlawanan wilayah.
7. Melaporkan setiap perkembangan

situasi dan kondisi wilayah kepada Dandim.

Sehingga dalam Program Swasembada Pangan, KORAMIL melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa) menjadi pihak yang terlibat langsung secara praktik di masyarakat, dalam hal ini para petani. Babinsa merupakan personil TNI-AD yang disebar oleh Pusat Komando-nya untuk membina masyarakat dalam berbagai bidang. Babinsa dapat dikatakan sebagai penyambung lidah antara masyarakat sipil dengan lembaga militer karena keterlibatannya dalam masyarakat cukup penting seperti membantu masyarakat dalam pembangunan infrastruktur untuk mencegah bencana alam serta penanggulanganannya, membantu kecamatan dan kelurahan dalam pendataan geografis.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk membahas penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih difokuskan pada pemahaman fenomena-fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan menitikberatkan pada gambaran yang lengkap, dengan tujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya (Mulyana, 2003:145). Pada penelitian kualitatif tidak bisa diperoleh atau diukur menggunakan prosedur-prosedur statistik, dan penelitian jenis ini sering digunakan sebagai penelitian tentang kehidupan suatu masyarakat. Data yang dihasilkan pada penelitian kualitatif adalah data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan pelaku yang sedang diamati.

Adapun data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan cara *purposive sampling* terhadap 3 orang informan yang memiliki relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu, Kapten Robert selaku Pasi Teritorial KODIM 1607/Sumbawa, Kapten Tamtanus selaku Komandan KORAMIL 1607/-01 Sumbawa, dan Sersan Mustarudin selaku anggota Babinsa KORAMIL 1607/-01 Sumbawa. Selain wawancara secara mendalam, peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi di wilayah KORAMIL 1607/-01 Sumbawa.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah KORAMIL 1607/-01 Sumbawa yang mencakup 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Unter Iwes dan Kecamatan Batu Lanteh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menyukseskan Program Swasembada Pangan, berikut alur Program Swasembada Pangan yang dilakukan oleh TNI-AD:

1. di jajaran KODAM sampai dengan KORAMIL dan Babinsa untuk mendampingi petani. TNI-AD melalui Babinsa berperan serta membantu petani di setiap desa, misalnya dalam mencegah luapan air sungai akibat banjir yang berdampak pada kerusakan tanaman dan kerusakan tanggul, membantu pengaman distribusi pupuk mulai dari pabrik sampai petani, membantu menjadi penyuluh pertanian, bersama masyarakat memperbaiki saluran irigasi agar suplai kebutuhan persawahan cukup dan adanya upaya perbaikan sarana jalan yang menjadi akses penting dalam sirkulasi transportasi produksi pertanian.
2. Menyiapkan Prajurit dan SDM TNI-AD yang memahami tentang pertanian tanaman pangan melalui pelatihan.
3. Menyiapkan dan membantu petani dan kelompok tani mengoperasikan alat dan mesin pertanian.
4. Mengawasi penyaluran sarana produksi (benih, pupuk dan alat dan mesin pertanian).
5. Mengawasi pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi serta pengairan.
6. Pencetakan sawah baru. Membantu dan mengoptimalkan serapan gabah petani (sergap) yang dilaksanakan Perum Bulog.

Komunikasi Persuasif Babinsa kepada Petani

Babinsa menerapkan fungsi komunikasi organisasi pengaruh dan persuasi (*influence and persuasive function*). Menurut Kamus Ilmu Komunikasi (dalam Rakhmat, 2008 : 14), komunikasi persuasif diartikan sebagai "Suatu proses untuk mempengaruhi pendapat, sikap dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri". Selain itu, komunikasi persuasif juga diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan sebagai ajakan atau bujukan agar mau bertindak sesuai dengan keinginan komunikator (Barata, 2003 : 70). Menurut De Vito (2011 : 499) usaha melakukan persuasi ini memusatkan perhatian pada upaya mengubah atau memperkuat sikap atau kepercayaan khalayak atau pada upaya mengajak mereka bertindak dengan cara tertentu.

Fungsi persuasif Babinsa tidak hanya dilakukan untuk mengajak petani menanam dengan sistem modern. Para petani yang tidak memiliki lahan pertanian ataupun petani yang memiliki lahan selain sawah, diarahkan untuk memanfaatkan lahan tersebut sebagai sumber penghasilan alternatif. Serda Mustaudin menjelaskan bahwa di kecamatan yang menjadi wilayah tugasnya tidak semua memiliki sawah. Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas yang menjadikan Kelapa dan Jambu Monyet sebagai komoditi utama, setelah diberikan pengertian oleh Serda Mustarudin, masyarakat setempat menambah jenis tanaman baru seperti Durian dan Mangga. Hal tersebut guna mengantisipasi apabila komoditi sebelumnya yang telah tumbuh lama mengalami kerusakan sehingga tidak dapat menghasilkan buah yang biasa dijual.

Komunikasi 'Kerik Selamat' Babinsa terhadap Petani

Salah satu nilai kearifan lokal masyarakat Sumbawa, yaitu '*Kerik Selamat*' (Zuhri, 2016). Nilai tersebut mengandung makna semangat kerja, semangat menjaga kelestarian lingkungan (alam), semangat gotong-royong, serta semangat ketahuidan (salah satu nilai yang memiliki korelasi dengan ajaran agama Islam; agama mayoritas masyarakat Sumbawa). Dari proses dan pola persuasive yang dilakukan, Babinsa KORAMIL 1607/-01 Sumbawa dalam Program Swasembada Pangan mengarah pada nilai kearifan lokal masyarakat Sumbawa; '*Kerik Selamat*'. Hal ini tercermin dalam tugas pokok bidang Teritorial tentang pengendalian kerusakan daerah yang diaplikasikan oleh

Babinsa dengan inovasi pemanfaatan lahan non-sawah untuk meningkatkan varian komoditi pangan, selain melakukan rehabilitasi sawah dan saluran irigasi, pemupukan, serta pengairan.

Semangat gotong-royong dan kebersamaan yang terkandung dalam nilai '*Kerik Salamat*' menjadi instrumen dalam pelaksanaan Program Swasembada Pangan di wilayah KORAMIL 1607/-01 Sumbawa. Kekompakan Babinsa dengan para petani mampu mencapai hasil yang cukup baik. Kebersamaan Babinsa dengan para petani juga merupakan perwujudan dari salah satu prinsip hidup masyarakat Sumbawa yang dikenal dengan istilah '*saling beme*', yang berarti saling merangkul satu sama lain. Prinsip ini sejalan dengan karakter militer yang dibentuk sejak masa pendidikan untuk menjaga kekompakan, kebersamaan dan rasa saling memiliki, yang disebut sebagai jiwa korsa. Sehingga, kolaborasi nilai '*Kerik Salamat*' dengan instrumen prinsip '*saling beme*' menghantarkan Sumbawa pada kesuksesan Program Swasembada Pangan.

TNI-AD dan Hasil Program Swasembada Pangan

Kapten Inf. Robert menjelaskan bahwa ketersediaan komoditi beras di Perum Bulog Sub Divre Sumbawa sampai dengan tahun 2018 mencapai 5.467.254,41 ton. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat mengingat akan adanya panen raya 2018. Dikutip dari samawarea.com edisi Januari 2018, pada tahun 2016 lalu, Bulog Sumbawa membantu mengirimkan beras mencapai 24.900 ton ke sejumlah daerah seperti Bali sebanyak 6.900 ton, NTT 5.900 ton, dan Pulau Lombok meliputi Kabupaten Lombok Timur 5.000 ton. Sedangkan Kabupaten Lombok Tengah dan Barat mencapai 6.900 ton. Hal tersebut juga merupakan salah satu usaha Bulog Sumbawa untuk menjaga ketersediaan beras di gudangnya agar selalu *fresh* dan tidak mengurangi mutu, sehingga masyarakat tidak memberikan keluhan beras yang tidak layak konsumsi.

Adapun hasil yang diperoleh sampai dengan Desember 2017 untuk komoditi Padi, Jagung dan Kedelai yang menjadi produk utama Program Swasembada Pangan, yaitu:

- ▮ Lahan Padi seluas 18.754 Ha. dari target pencapaian seluas 33,248 Ha
- ▮ Lahan Jagung seluas 33.723 Ha dari target pencapaian seluas 81.355 Ha.
- ▮ Lahan Kedelai seluas 264 Ha dari target pencapaian seluas 4.609 Ha.

Sementara hasil yang diperoleh di Kabupaten Sumbawa untuk komoditi padi yaitu mencapai ton/tahun. TNI-AD dalam pelaksanaan tugasnya berupaya untuk mengarahkan hasil panen petani dapat diserahkan ke Bulog dengan harga standard nasional Rp. 3.700/kg. Namun Pasi teritorial KODIM 1607/Sumbawa mengungkapkan masih adanya petani yang menginginkan keuntungan lebih dengan menjual hasil panen ke pihak perusahaan swasta dengan harga sekitar Rp 4.000/kg. Kapten Inf. Tamtanus selaku Danramil Kota 1607/-01 Sumbawa menjelaskan persediaan hasil panen dapat diserahkan ke Bulog apabila tidak terjual ke pihak swasta. Selain untuk memenuhi ketersediaan pangan, hal ini juga untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sistem komunikasi organisasi dapat bekerja efektif jika kebijakan pimpinan tentang saluran komunikasi jelas dan semua pejabat menduduki pusat-pusat komunikasi mempunyai kompetensi komunikasi yang memadai (Hardjana, 2016: 132). Dalam Program Swasembada pangan di wilayah teritorialnya, KORAMIL 1607 Sumbawa menunjukkan karakteristik efektifitas sistem komunikasi. Sistem komunikasi organisasi menurut Barnard (1938: 174-180 dalam Hardjana, 2016) dapat bekerja efektif, jika pimpinan mengembangkan kebijakan sebagai berikut:

1. Saluran komunikasi diketahui secara pasti: semua anggota organisasi mengetahui garis kewenangan yang tertata rapi dan mapan. Dalam Program Swasembada Pangan, Danramil secara jelas memaparkan garis komando Angkatan Darat yang memiliki kewenangan terhadap bidang teritorial.
2. Kewenangan objektif membutuhkan saluran komunikasi formal yang pasti: setiap anggota organisasi tahu kepada siapa ia harus melapor dan dari siapa ia mengharapkan laporan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai anggota Babinsa, mereka diwajibkan untuk memberikan laporan rutin terkait perkembangan wilayah binaan kepada atasan, dalam hal ini adalah Danramil. Sebaliknya, Danramil mengetahui kepada siapa dirinya menerima informasi terkait keberlangsungan program di lapangan.
3. Garis komunikasi adalah langsung atau sependek mungkin: jenjang-jenjang hierarkis dibuat sesederhana, supaya pesan komunikasi diterima

- tepat waktu dengan tidak terdistorsi. Laporan-laporan yang diberikan anggota Babinsa akan dimuat oleh pimpinan, yaitu Danramil dan akan disampaikan kepada atasan yaitu Komandan KODIM (Dandim).
4. Pada prinsipnya garis komunikasi lengkap harus digunakan: arus komunikasi mengalir sepanjang jenjang hierarki tanpa ada yang terlewatkan, lompatan jenjang menimbulkan gangguan terhadap efektifitas komunikasi. Setelah data dari masing-masing KORAMIL terkumpul di KODIM, maka KODIM bertanggung jawab untuk melanjutkannya ke KOREM. Begitu pula setelah semua KODIM mengumpulkan informasi, KOREM akan melanjutkannya ke KODAM hingga terkumpul di pusat data MABES-AD.
 5. Pusat-pusat komunikasi diisi oleh mereka yang mempunyai kompetensi komunikasi: para pejabat, mandor kepala, dan seterusnya memiliki kompetensi komunikasi yang sepadan. Semakin dekat ke pusat hierarkis yang dipersyaratkan semakin umum, sebaliknya semakin ke bawah kompetensi semakin spesifik. Informasi spesifik yang diterima Danramil dari Babinsa akan digeneralisasikan dalam sebuah laporan, dan laporan tersebut yang akan sampai ke pusat hierarkis.
 6. Garis komunikasi tidak boleh tersela atau terputus apabila organisasi sedang berfungsi; bila komunikasi antarpejabat sedang berlangsung tidak boleh terinterupsi oleh hal-hal lain atau tidak terputus di tengah jalan.
 7. Setiap komunikasi harus disahkan: ciri utama setiap komunikasi formal adalah otentifikasi atau harus adanya pengesahan agar diterima sebagai komunikasi resmi dan tidak dapat diabaikan. Dalam program ini, informasi tugas yang sampai pada tingkat KORAMIL berupa Surat Perintah yang telah disahkan oleh pimpinan masing-masing pangkalan komando. Seperti KORAMIL 1607/-01 Sumbawa yang diberikan Surat Perintah oleh Dandim.

KESIMPULAN

Peneliti memandang bahwa keterlibatan militer dalam Program Swasembada Pangan, dalam hal ini adalah jajaran KORAMIL dan Babinsa TNI-AD, merupakan bagian dari pengaplikasian tugas pokok dan tanggung jawab TNI-AD dalam bidang Teritorial. Hal ini memiliki perbedaan dengan kebijakan dan prestasi Indonesia tahun 1984 dalam bidang Swasembada Pangan yaitu pada tahun tersebut, Indonesia dipimpin oleh seorang presiden dengan latar belakang seorang militer. Lembaga pemerintahan saat itu juga dipimpin oleh orang-orang dengan latar belakang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sehingga timbulnya karakter pemerintahan yang otoriter. Sikap dan karakter otoriter tersebut berhasil membuat Indonesia mengalami Swasembada beras dan memperoleh penghargaan dari *Food and Agriculture Organization* (FAO).

Program Swasembada Pangan yang dimulai pada tahun 2015 atas kerjasama Kepala Staf Angkatan Darat dengan Menteri Pertanian menjadi langkah yang ditempuh untuk mewujudkan kembali swasembada dan ketahanan pangan di Indonesia. Perbedaannya, kali ini pemerintah dari institusi sipil melibatkan institusi atau lembaga militer. TNI-AD mengerahkan para anggota Babinsa yang bertugas di setiap KORAMIL untuk melaksanakan upaya khusus (upsus) tersebut.

Peneliti menemukan bahwa secara internal lembaga militer, dalam hal ini TNI-AD, memiliki karakter komunikasi instruktif. Setiap perintah yang datang dari pimpinan merupakan sebuah tugas yang tidak bisa ditawar. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa sebagai anggota, para Babinsa tidak dapat mengemukakan pendapat dan keluhan kepada atasan. Mereka secara terbuka menyampaikannya kepada pimpinan untuk menghindari masalah dan kegagalan dalam tugas sehingga solusi danantisipasi telah tersedia. Hal tersebut menggiring kita pada arus komunikasi dua arah yang dapat bersifat *top-down* pada satu waktu dan juga *bottom-up* di waktu dan situasi lainnya.

Peneliti juga menemukan adanya kecenderungan penggunaan nilai kearifan lokal Sumbawa '*Kerik Salam*' oleh Babinsa KORAMIL 1607/-01 Sumbawa. Nilai tersebut mengandung makna dari salah satu prinsip hidup masyarakat Sumbawa yang dikenal dengan istilah '*saling beme*' yang artinya saling merangkul. Instrumen '*saling beme*' juga merupakan perwujudan karakter militer yang menjunjung tinggi jiwa korsa. *Pola* komunikasi yang demikian mampu memberikan pengaruh

yang baik dan pencapaian yang maksimal. Ketersediaan beras di Sumbawa yang mencukupi kebutuhan masyarakat untuk beberapa waktu mendatang menjadi salah satu indikator Swasembada yang telah terpenuhi. Gaya dan karakter yang demikian mampu mengoptimalkan kinerja petani dan Babinsa sehingga mampu menciptakan hasil yang cukup memuaskan.

PPPA TNI-AD TA 2012 sesuai Peraturan KSAD No. Perkasad/125/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Tugas Pokok TNI Angkatan Darat.

UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

UU No. 7 Tahun 1996 tentang Ketahanan dan Swasembada Pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zaghul, Imad Abdurrahim. 2004. *Psikologi Militer*. Jakarta ; Khalifa.

Barata, Atep Adya. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta ; Elex Media Komputindo.

Hardjana, Andre. 2016. *Komunikasi Organisasi: Konsep dan Strategi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Rosdakarya.

Rakhmat, Jalaluddin. 2008. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Sikumbang, Risrizal. 2017. *Pilar Pertanian: Komitmen Memperkuat Ketahanan Pangan*. Jakarta.

Uchjana, Onong. 2007. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Rosdakarya.

Zuhri, Lahmuddin. (Juni, 2016). *Nilai Lokal Kerik Salamat sebagai Asas dalam Pembangunan Hukum*. Jurnal Retchidee, 11(1), 64-83.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <http://kbbi.web.id>, (diakses 19 September 2017).